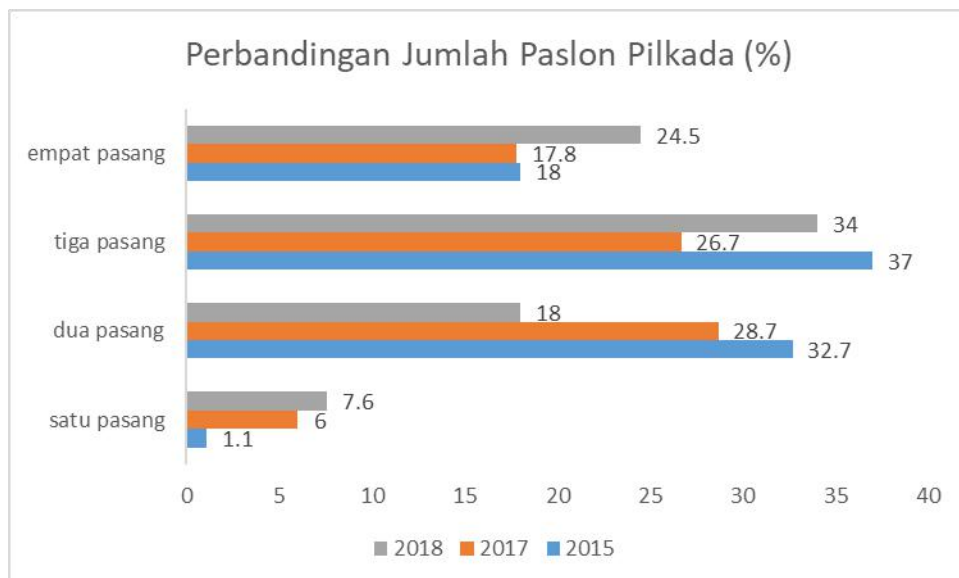


PROFIL PARA KANDIDAT PILKADA 2018: PETAHANA, POLITISI, ATAU JENDERAL?

Hari Rabu, 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada pada bulan Juni ini telah menuntaskan tahapan pendaftaran pasangan calon. Meskipun KPUD akan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dan persyaratan lainnya, hal yang menarik disimak adalah nama dan profil para kandidat tersebut. Para kandidat ini sebenarnya telah memenuhi ruang pemberitaan media nasional dan lokal sepanjang minggu ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait **573 pasangan calon di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota ini**. Tulisan ini akan membahas lima isu utama yang berkaitan dengan pasangan calon dalam Pilkada 2018: jumlah rata-rata paslon per wilayah, jumlah kandidat perempuan, latar belakang dan status pekerjaan kandidat, poros koalisi dan latar belakang dinasti dan orang kuat lokal.

A. 3-4 Paslon per Wilayah

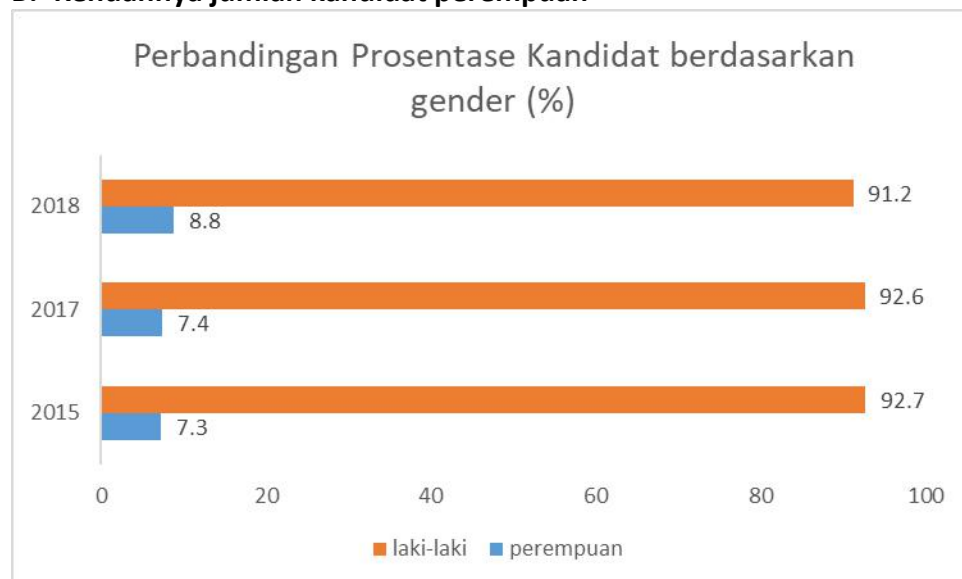
Merujuk dua jenis pencalonan yaitu perseorangan dan partai politik, maka pasangan calon dari perseorangan mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 29 persen menjadi 22 persen di tahun 2018. Para kandidat menyadari bahwa paslon perseorangan memiliki kans yang belum tentu menguntungkan bagi kemenangan mereka karena jejaring politik yang tidak sepenuhnya kuat bila dibandingkan dengan jejaring partai politik.



Tabel tersebut ingin menyatakan bahwa: (1) terjadi **peningkatan jumlah paslon satu pasang** atau calon tunggal; (2) terjadi **penurunan jumlah paslon dua pasang**; (3) terjadi **peningkatan jumlah paslon tiga dan empat pasang**. Tabel tersebut menunjukkan hal yang ironi yaitu meningkatnya jumlah paslon satu pasang dan tiga-empat pasang. Kenapa? Peningkatan calon tunggal menunjukkan bahwa partai politik tidak ingin pusing dengan kandidat yang populer, terbukti berhasil dan disukai publik (biasanya petahana). Untuk itu, kandidat petahana yang dimunculkan sebagai calon tunggal. Sebaliknya, jumlah calon semakin banyak menunjukkan partai politik tidak memperhatikan adanya potensi kemenangan di kandidat, namun lebih mementingkan eksistensi koalisi parpol semata dalam

pilkada. Kami menduga, elite-elite partai politik tidak memperhatikan secara serius hasil survei opini publik terhadap popularitas dan elektabilitas para kandidat demi pencalonan yang lebih efektif. Apalagi adanya kecenderungan penentuan akhir pencalonan berada di tangan pengurus pusat partai politik bukan di pengurus daerah.

B. Rendahnya jumlah kandidat perempuan



Dari tabel ini dapat disampaikan bahwa **kandidat perempuan dalam pilkada masih belum diperhatikan oleh para elite politik** di pusat ataupun daerah dengan memberi peluang dan kesempatan dalam pencalonan. Oleh karena elite partai memiliki pola pikir memenangkan pertarungan secara nyata dan kandidat perempuan belum tentu semua memiliki potensi kemenangan tersebut, maka perempuan dianggap bukan prioritas utama.

C. Petahana, politisi dan Jenderal

Sebanyak 19 persen adalah petahana yang mencalonkan untuk melanjutkan di posisi yang sama ataupun posisi yang berbeda. Sedangkan para anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 20 persen juga ikut mencalonkan dengan posisi yang beragam. Sisanya adalah PNS dan swasta yang ikut terlibat dalam pencalonan ini. Lalu bagaimana aparat TNI/Polri? Di tahun ini, ada sebanyak 8 anggota TNI dan 9 aparat Polri yang mengikuti Pilkada. Hal ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan pada tahun lalu hanya sebanyak 2 orang dari TNI dan 2 orang Polri.

Apa maknanya? **Para petahana dan politisi mendominasi pencalonan pilkada seperti yang juga terjadi di pilkada sebelumnya.** Namun yang menarik adalah **makin banyaknya anggota TNI dan Polri yang mendaftar dalam Pilkada.** Sayangnya, mereka ini baru memutuskan pensiun dini tersebut menjelang hari pencalonan. Padahal sebagian besar dari mereka telah gerilya dan pengenalan diri kepada masyarakat sebagai calon sudah dilakukan jauh hari sebelum pencalonan.

D. Menguatnya poros koalisi?

Data di tingkat provinsi mengatakan bahwa secara keseluruhan dalam tiga pilkada (2015, 2017 dan 2018) bahwa **terjadi penguatan dua poros koalisi** yang dipimpin PDIP dan Gerindra. Sebanyak 24 provinsi memiliki minimal adanya dua poros koalisi tersebut dan sisanya adalah koalisi yang cair. Namun demikian, **poros koalisi yang terbangun pun tidak lah konsisten di semua provinsi.** Semisal, Gerindra tidak selalu berkoalisi dengan PKS di semua provinsi. Hal yang sama juga terjadi dengan PDIP . Tidak semua daerah PDIP dapat berpasangan dengan Hanura atau Golkar. Sementara itu, Gerindra dan PDIP dapat mudah berkoalisi dengan mudah di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Papua. Untuk itu, **poros koalisi yang terbentuk adalah keropos dan lemah** sehingga hubungan eksekutif dan legislatif yang memadai, sebagaimana yang diharapkan, di setiap wilayah sulit dicapai.

E. Dinasti dan Orang Kuat Lokal

Hal yang juga menarik diperhatikan adalah soal attachment politik para kandidat dalam konteks dinasti ataupun orang kuat. Dinasti dapat direferensikan sebagai mereka yang memiliki ikatan emosional dan kekerabatan dengan pejabat saat ini ataupun sebelumnya. Sementara itu, orang kuat lokal (local strongmen) adalah kandidat yang memiliki afiliasi dan kedekatan dengan tokoh informal yang terpandang atau klan dari komunitas dan keluarga tertentu yang dihormati masyarakat di daerah tersebut. Dalam pencalonan provinsi, untuk sementara, kami mengidentifikasi 12 kandidat terkait dengan dinasti dan 10 orang yang berafiliasi dengan orang kuat lokal tersebut. Artinya, para kandidat yang berasal dan memiliki ikatan yang relatif baik dengan dinasti ataupun tokoh yang disegani di wilayah adalah pertimbangan yang paling penting bagi elite partai politik dalam menentukan calon.

Disclaimer

Data-data yang disampaikan adalah data resmi yang tercantum di website KPU RI per tanggal 11 Januari 2018. Analisa yang dilakukan pun juga bersifat tentatif dan dapat didiskusikan karena data pencalonan di tahun 2018 belum diverifikasi tuntas oleh KPUD. Oeh karena keterbatasan yang kami miliki, data mengenai poros koalisi dan dinasti adalah berbasiskan provinsi dengan ditambahkan data sekunder berdasarkan penelusuran sementara via google.

Depok, 11 Januari 2018

Dr.Aditya Perdana

Direktur

Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP UI

No handphone: 0812-465-62545

Email: adperd@gmail.com